

SILPA Kalimantan Selatan Tahun 2023 Rp 1,569 Triliun Lebih



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/415296/gubernur-ungkap-silpa-kalsel-2023-rp1569-triliun-lebih>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar yang juga Ketua TAPD Kalsel mengatakan, terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2023 yang cukup besar dikarenakan informasi dana bagi hasilnya itu diketahui setelah pembahasan APBD perubahan. Dalam LPPA 2023 pembiayaan penerimaan Rp1,083 triliun lebih (100 persen) dan pengeluaran Rp162,837 miliar lebih (100 persen) sehingga SILPA Rp1,562 triliun lebih.

“Jadi dana bagi hasil 2023 yang cukup besar berasal dari sektor pertambangan karena meningkatnya harga sehingga ada tambahan dari pemerintah pusat,” kata Roy, di Banjarmasin.

Diketahui, Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) 2023 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp9,877 triliun lebih atau 103,30 persen dari yang dianggarkan Rp9,12 triliun lebih.

Realisasi belanja daerah 2023 Rp6,994 triliun lebih atau 89,68 persen dari yang dianggarkan Rp7,80 triliun lebih atau surplus Rp 641 miliar lebih.

Khusus Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi Rp4,861 triliun lebih atau mencapai 107,61 persen dari yang dianggarkan Rp4,517 triliun lebih.

Pendapatan Daerah Kalsel 2023 tersebut dari PAD kontribusi tidak mencapai 50 persen atau selebihnya/Rp5,016 triliun lebih antara lain berupa transfer pemerintah pusat.

Roy pun menjelaskan, kedepannya akan mengoptimalkan dana SILPA yang ada pada program-program kegiatan pembangunan di APBD Perubahan 2024.

“Kita optimalkan SILPA Rp1,5 triliun pada APBD Perubahan 2024 jika waktunya itu cukup tetapi jika tidak cukup waktunya maka akan dimasukkan pada kegiatan awal 2025,” tutur Roy.

Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan, efisiensi belanja yang merupakan salah satu penyebab SILPA, yaitu banyak kunjungan kerja legislatif maupun eksekutif yang difokuskan hanya di dalam daerah. Namun, lebih banyak tamu luar daerah yang berkunjung ke Kalsel.

“Selanjutnya, dari pembahasan akan ditindaklanjuti pada tahap pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 menjadi Perda yang diagendakan di bulan ini,” kata Supian.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/415296/gubernur-ungkap-silpa-kalsel-2023-rp1569-triliun-lebih>, 20 Mei 2024.
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/06/04/pemprov-bersama-banggar-dprd-kalsel-bahas-raperda-pertanggungjawaban-apbd-2023/>, 4 Juni 2024.

Catatan:

☛ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)

☛ Struktur APBD

